

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Haniyah Della Yulsa<sup>1</sup>, Idris<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*Korespondensi: [haniyahdellayulsa13@gmail.com](mailto:haniyahdellayulsa13@gmail.com), [idris@fe.unp.ac.id](mailto:idris@fe.unp.ac.id)

---

### Info Artikel

#### Diterima:

16 November 2024

#### Disetujui:

2 Desember 2024

#### Terbit daring:

16 Desember 2024

DOI: -

### Sitasi:

Yulsa, H. D. & Idris (2024).  
Pengaruh Pengeluaran  
Pemerintah, Tingkat  
Pengangguran Terbuka, Inflasi  
dan Ketimpangan Pendapatan  
Terhadap Kemiskinan di  
Indonesia.

### Abstract:

*This study aims to determine the Effect of Government Spending, Open Unemployment Rate, Inflation and Income Inequality on Poverty in Indonesia. The type of data used in this study is secondary data using panel data which is a combination of 2016-2022 Time series data and Cross section data from 34 Provinces in Indonesia. The research was obtained from the publication of the Central Statistics Agency (BPS) and other related agencies. The analysis used is descriptive analysis and inductive analysis. In inductive analysis, this study uses the panel data regression method. Based on the results of the panel data regression analysis using the Fixed Effect Model and the description of the research results between the independent variables and the dependent variables as described above, the following conclusions are drawn. Government spending has a negative effect on poverty in Indonesia, every increase in government spending, poverty in Indonesia will decrease and vice versa, if government spending decreases, poverty in Indonesia will increase. The open unemployment rate has a positive effect on poverty in Indonesia, if the open unemployment rate increases, poverty will also increase. Conversely, if the open unemployment rate decreases, poverty in Indonesia will also decrease. Inflation has a negative effect on poverty in Indonesia, this is inversely proportional to the theoretical basis which may be caused by certain social phenomena or because inflation is a determinant of macroeconomics, so it may not have a direct effect on poverty levels. Income inequality has a positive effect on poverty in Indonesia, this shows that if income inequality increases, poverty in Indonesia will increase. Conversely, if income inequality decreases, poverty in Indonesia will also decrease.*

**Keywords:** Government Expenditure, TPT, Inflation, Income Inequality, Poverty

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan menggunakan data panel yang merupakan gabungan data Time series 2016-2022 dan data Cross section 34 Provinsi di Indonesia. Penelitian didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lain. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Berdasarkan Hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* serta deskripsi terhadap hasil penelitian antara variabel bebas dengan variabel terikat seperti yang telah dijabarkan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah maka kemiskinan di Indonesia akan turun dan begitu juga sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah mengalami penurunan maka kemiskinan di Indonesia akan meningkat. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia, jika tingkat pengangguran terbuka meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan maka kemiskinan di Indonesia juga akan mengalami penurunan. Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia, ini berbanding terbalik dengan landasan teori yang mungkin disebabkan oleh adanya fenomena sosial tertentu atau karena inflasi merupakan determinan dari makro ekonomi, sehingga bisa saja tidak berpengaruh langsung pada tingkat kemiskinan. Ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia, ini menunjukkan bahwa jika ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan maka kemiskinan di Indonesia akan meningkat

**Kata Kunci:** Pengeluaran Pemerintah, TPT, Inflasi, Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan

**Kode Klasifikasi JEL:** H5, E3, D63

---

## PENDAHULUAN

Tingkat kesejahteraan warga negara merupakan indikator yang baik untuk menilai kemajuan negara tersebut (Marhaeni et al., 2014). Hal ini juga berlaku di Indonesia. Setiap strategi pembangunan negara mengutamakan penanggulangan kemiskinan sebagai cara untuk menurunkan kesenjangan pendapatan. Menurut Purnama et al. (2016), kemiskinan merupakan masalah yang rumit dalam pembangunan yang tidak hanya mencakup faktor ekonomi tetapi juga faktor politik, sosial, dan budaya. Salah satu metrik utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan inisiatif pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin belum sepenuhnya hilang, meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan secara ekstensif melalui bantuan lembaga terkait. Data menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin yang masih tergolong miskin konsisten di seluruh provinsi di Indonesia. Upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin tidak dapat dilepaskan dari menurunnya angka kemiskinan di Indonesia.

Rencana pemerintah untuk menekan dan menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan dan metrik utama yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan. Strategi yang efektif dan efisien dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan kunci sukses dalam mewujudkan pembangunan kearah yang lebih baik. Todaro dan Smith (2020) mengungkapkan bahwa penanggulangan terhadap kemiskinan merupakan salah satu bagian dari masalah pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami banyak negara, termasuk Indonesia. Penanggulangan kemiskinan merupakan topik yang mendapat perhatian khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan negara-negara di seluruh dunia untuk menghapus kemiskinan dan dimasukkannya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama. Menurut Todaro (2015), akar penyebab dari semua masalah pembangunan adalah kemiskinan, yang semakin meluas dan tinggi angkanya. Akibatnya, inisiatif untuk mengurangi kemiskinan memerlukan waktu, rencana yang benar-benar tepat, dan sumber daya yang dapat digunakan seefisien mungkin.



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat rata-rata penduduk miskin menurut pulau di Indonesia dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022. Dari gambar dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin terbanyak berada di pulau Papua dengan rata-rata 24,4 persen. Pulau Kalimantan menjadi pulau dengan persentase penduduk miskin paling sedikit dengan rata-rata 5,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan pendapatan di setiap provinsi di Indonesia yang menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Meskipun demikian, masalah kemiskinan yang terus-menerus terjadi di Indonesia menyoroti perlunya desain kebijakan yang lebih ampuh yang dapat sepenuhnya mengatasi masalah ini (Dariwardani, 2014). Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam program-program sosial dan pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Melalui anggaran yang dialokasikan untuk program-program sosial dan pembangunan, pemerintah dapat memberikan bantuan langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Dana tersebut dapat digunakan untuk menyediakan bantuan sosial, seperti subsidi makanan, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga dapat diarahkan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh. Peningkatan pengeluaran pemerintah membuktikan keseriusan dalam memutus rantai kemiskinan, besarnya pengeluaran tersebut diupayakan untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Pengeluaran yang kebutuhannya ditujukan kepada orang dalam kategori miskin disebut *pro poor expenditure*. Berek et. al. (2006) dalam Wahyudi (2011, 26) memberikan tiga pengertian mengenai anggaran yang mendukung terhadap pengentasan kemiskinan.

Pertama, anggaran yang menekankan nilai inisiatif pembangunan yang mendukung masyarakat miskin. Kedua, proses penganggaran dan pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan inisiatif, program, dan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan/atau mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin. Pada penelitian Wibowo (2014) mengungkapkan pengeluaran pada perbaikan dan pengadaan infrastruktur dianggap sebagai kebijakan yang pro terhadap rakyat miskin. Pembangunan infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan daerah, hal ini sesuai dengan pernyataan Buhr (2003) yang menyatakan bahwa infrastruktur merupakan syarat utama dari pembangunan ekonomi. Sebagai penggerak roda perekonomian sudah pasti infrastruktur memiliki peranan penting guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur fisik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menurut Prasetyo, E.J. (2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu komponen utama inisiatif untuk mengurangi kemiskinan adalah infrastruktur. Membangun infrastruktur adalah salah satu cara yang paling berhasil untuk memerangi kemiskinan. Kondisi pertumbuhan regional akan membaik dengan pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi dengan baik.

Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan memperlancar mobilitas perekonomian melalui penyediaan infrastruktur yang bermutu. Selain menjamin efektivitas dan efisiensi, infrastruktur yang terbangun dengan baik akan memperlancar arus barang dan jasa serta mendorong perekonomian. Tentunya, ketika perekonomian tumbuh, pendapatan masyarakat pun akan meningkat, sehingga masyarakat terbebas dari belenggu kemiskinan.

Selain pengeluaran pemerintah, tenaga kerja mempengaruhi kemiskinan. Hubungan antara tenaga kerja dan kemiskinan sangat erat, di mana tingkat kemiskinan sering kali berkorelasi dengan tingkat pengangguran atau pekerjaan yang tidak layak. Ketika tingkat pengangguran tinggi atau banyak pekerja yang tidak memiliki pekerjaan yang memberikan

pendapatan yang cukup, maka tingkat kemiskinan cenderung meningkat. Sebaliknya, upaya untuk meningkatkan akses tenaga kerja terhadap pekerjaan yang layak dan upah yang memadai dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini mencakup kebijakan-kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pemberian pelatihan keterampilan, dan perluasan akses terhadap pekerjaan formal. Studi seperti yang dilakukan oleh Fields (2004) menyoroti pentingnya keterkaitan antara struktur ketenagakerjaan dan tingkat kemiskinan, di mana kualitas pekerjaan, upah, dan akses terhadap pekerjaan yang stabil berperan penting dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu negara.

Faktor selanjutnya adalah inflasi. Banyak penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dwi Puspa Hambasari dan Kunto Inggit (2016), menunjukkan bahwa hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, sedangkan variabel pertumbuhan penduduk dan inflasi tidak berpengaruh.

Inflasi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks dan sering kali saling mempengaruhi. Studi Saeed et al (2018) menunjukkan adanya asimetri jangka panjang antara inflasi dan kemiskinan. Ditemukan bahwa peningkatan inflasi cenderung meningkatkan kemiskinan karena menurunnya daya beli masyarakat akibat dari kenaikan harga barang atau jasa, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Sebaliknya, penurunan inflasi juga dapat meningkatkan kemiskinan dalam jangka panjang karena menurunnya permintaan agregat dan penawaran agregat.

Faktor selanjutnya adalah ketimpangan pendapatan. Bagi sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, kesenjangan pendapatan yang tinggi merupakan masalah serius. Ketika terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat, hal ini disebut sebagai ketimpangan pendapatan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan meliputi heterogenitas pembangunan etnis, ketidaksetaraan yang terkait dengan sistem politik otoriter, serta kegagalan pemerintah dalam menghargai hak-hak atas property (Glaeser et al, 2006).

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan dapat diamati dalam berbagai bentuk, mulai dari disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, hingga kesenjangan antara kelompok etnis. Pembangunan yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan sering kali menjadi salah satu faktor utama dalam ketimpangan pendapatan. Perbedaan infrastruktur, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peluang ekonomi antara kota dan desa dapat memperbesar kesenjangan pendapatan.

Selain itu, ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan kebijakan. Sistem politik yang otoriter dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selain itu, kegagalan pemerintah dalam menegakkan hak-hak atas properti dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan meningkatkan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap properti dan yang tidak.

Menurut Khasanah, L. (2021) Tingkat Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh variabel Ketimpangan Pendapatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meningkatnya ketimpangan pendapatan akan menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia juga meningkat. Ketika kesenjangan antara pendapatan individu atau kelompok menjadi lebih besar, kemungkinan besar akan ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan miskin. Peningkatan ketimpangan pendapatan dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang

berpihak pada redistribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi yang lebih merata menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya upaya konkret untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah dan masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk kebijakan redistribusi pendapatan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, reformasi kebijakan agraria untuk memastikan perlindungan hak-hak atas properti, serta pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan masalah di atas dan adanya hasil penelitian, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, inflasi, dan ketimpangan Terhadap kemiskinan di Indonesia 2016-2022. Melalui analisis faktor-faktor tersebut, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kemiskinan di Indonesia selama periode tersebut, memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang program-program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, membantu dalam meningkatkan efisiensi alokasi anggaran pemerintah, memberikan dasar bagi pengembangan strategi pengembangan tenaga kerja, serta memberikan pandangan yang lebih luas tentang dampak kebijakan moneter terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengendalian inflasi, dengan demikian, penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi penting bagi literatur akademis tentang ekonomi pembangunan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif disusun berdasarkan data sekunder, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan. Analisis kuantitatif menggunakan model data panel. Penelitian yang dilakukan saat ini bertempat di 34 Provinsi Indonesia. Sedangkan data yang digunakan dalam waktu penelitian pada tahun 2016 hingga tahun 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan menggunakan data panel yang merupakan gabungan data Time series 2016-2022 dan data Cross section 34 Provinsi di Indonesia. Penelitian didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lain.

Peneliti menggunakan alat Analisis Regresi Data Panel, (Basuki, 2016) menyebutkan regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data *time series* dengan data *cross sectional*. Analisis regresi data panel dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan secara individual diikuti oleh titik waktu tertentu dengan variabel bebas adalah pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan variabel terikat kemiskinan. Adapun model regresi dalam penelitian ini dapat dimodelkan sebagai berikut:

Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Dimana Y merupakan Kemiskinan,  $X_1$  merupakan Pengeluaran Pemerintah,  $X_2$  merupakan Tingkat Pengangguran Terbuka,  $X_3$  merupakan Ketimpangan Pendapatan,  $X_4$  merupakan Inflasi,  $\epsilon_{it}$  merupakan Error Term.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Berdasarkan hasil regresi estimasi Fixed Effect Model pada tabel 4.6 maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

| Variable   | Coef.      | Std. Err. | t     | P>[z] |
|------------|------------|-----------|-------|-------|
| TPT        | 0.2465793  | 0.0645694 | 3.82  | 0.000 |
| Inflasi    | -0.0181577 | 0.0041272 | -4.40 | 0.000 |
| Gini Ratio | 0.1041081  | 0.0448707 | 2.32  | 0.021 |
| PP         | -1.224728  | 0.3014961 | -4.06 | 0.000 |
| _cons      | 27.82466   | 5.206622  | 5.34  | 0.000 |

Sumber: Hasil Olahan Stata 14

$$Y = 2.495866 - 0.0850824X_1 + 0.1053245X_2 + 0.4938773X_3 - 0.1653658X_4$$

Nilai konstanta ( $\alpha$ ) memiliki nilai positif sebesar 2.495866. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi  $X_1$ , dan  $X_2$ , bernilai 0, maka  $Y$  secara rata-rata adalah 2.495866.

Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah maka kemiskinan di Indonesia akan turun dan begitu juga sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah mengalami penurunan maka kemiskinan di Indonesia akan meningkat.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian (Wudil, A.A et al. 2023) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah, terutama pada pendidikan dan kesehatan, secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di berbagai negara, termasuk negara-negara Uni Eropa dan negara berkembang. Pengeluaran pemerintah yang ditargetkan dengan baik dan dialokasikan secara efisien dapat memiliki dampak yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan. Di Indonesia, pengeluaran infrastruktur memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, terutama di daerah pedesaan (Alamanda, A. 2020).

Hasil temuan ini tidak sejalan dengan penelitian (Zaki, Z. 2023) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada bantuan sosial dan subsidi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, seperti yang ditemukan di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum. Pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran atau terhambat oleh korupsi dan ketidakstabilan politik dapat mengurangi efektivitas dalam mengurangi kemiskinan.

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat pengangguran terbuka meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan maka kemiskinan di Indonesia juga akan mengalami penurunan. Temuan ini sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan suatu negara akan meningkat seiring dengan tingkat kemiskinannya. Misalnya, sejumlah negara di Afrika masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi saat ini.

Hasil ini sesuai dengan (Romdhoni, 2018) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat dan jumlah penduduk miskin akan meningkat seiring dengan meningkatnya curah hujan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan, menurut penelitian lain (Nurcholis, 2014) yang sesuai dengan temuan penelitian ini. Tingkat kemiskinan terbuka di Sumatera Utara juga memiliki dampak yang menguntungkan tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, menurut penelitian oleh Hwan Daniel et al. (2023).

Penelitian ini menemukan variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jika inflasi meningkat maka kemiskinan di Indonesia akan mengalami penurunan. Hal ini bertentangan dengan landasan teori yang

menyatakan bahwa inflasi mungkin tidak secara langsung memengaruhi tingkat kemiskinan karena merupakan penentu ekonomi makro atau karena inflasi dapat disebabkan oleh peristiwa sosial tertentu. Hal ini berlaku dalam sejumlah penelitian sebelumnya dan juga penelitian ini (Wina, A. 2019). Untuk memahami hubungan antara kedua faktor tersebut dengan baik, pada akhirnya diperlukan penelitian yang lebih menyeluruh untuk lokasi-lokasi lain di Indonesia.

Variabel ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jika ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan maka kemiskinan di Indonesia akan meningkat. Sebaliknya jika ketimpangan pendapatan mengalami penurunan maka kemiskinan di Indonesia juga akan menurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Fosu, A. 2010; Ram, R 2007) yang menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan, di mana peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung meningkatkan tingkat kemiskinan.

Sejalan dengan pernyataan diatas, penurunan ketimpangan pendapatan menyebabkan kemiskinan yang akan menurun (Suparman, et al. 2021). Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menyebabkan efek buruk pada masyarakat, seperti angka kemiskinan yang meningkat (Afandi, 2017). Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, di mana peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung meningkatkan tingkat kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

## SIMPULAN

Berdasarkan Hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* serta deskripsi terhadap hasil penelitian antara variabel bebas dengan variabel terikat seperti yang telah dijabarkan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah maka kemiskinan di Indonesia akan turun dan begitu juga sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah mengalami penurunan maka kemiskinan di Indonesia akan meningkat. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia, jika tingkat pengangguran terbuka meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan maka kemiskinan di Indonesia juga akan mengalami penurunan.

Inflasi berdampak negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Dampak ini dapat disebabkan oleh masalah sosial tertentu, atau mungkin tidak secara langsung memengaruhi tingkat kemiskinan karena inflasi merupakan penggerak ekonomi makro. Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi secara positif oleh ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa kemiskinan akan meningkat di Indonesia seiring dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, kemiskinan di Indonesia akan menurun jika ketimpangan ekonomi menurun.

## REFERENSI

- Afandi, A., Rantung, V. P., & Marashdeh, H. (2017). *Determinant of income inequality in Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 159–171. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art5>
- Alamanda, A. (2020). *The Effect Of Government Expenditure On Income Inequality and Poverty in Indonesia.* , 4, 1-11. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.614>.
- Fosu, A. (2010). *Inequality, income, and poverty: comparative global evidence. Social science quarterly*, 91 5, 1432-46. <https://doi.org/10.1111/J.1540-6237.2010.00739.X>.

- Glaeser EL. (2006). *Inequality*. (B. R. Weingast, BR, Wittman, & DA, Eds.). New York:Oxford University Press Inc.
- Khasanah, L. (2021). Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Bharanomics*, 1(2), 75-81.
- Marhaeni, A., Sudibia, I. K., Wirathi, I., Rustariyuni, S. D., & Dewi, N. P. M. 2014. Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal piramida*, 10(1), 8 – 18.
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 48. <https://doi.org/10.22219/jep.v12i1.3654>
- Prasetyo, E. J. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah untuk invrastruktur pendidikan, kesehatan dan PDRB terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara timur tahun TAHUN 2014-2018 (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).
- Purnama, N. P. A. M. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal piramida*, 12(1), 101–110.
- Ram, R. (2007). Roles of income and equality in poverty reduction: recent cross-country evidence. *Journal of International Development*, 19, 919-926. <https://doi.org/10.1002/JID.1348>.
- Saeed (2018). *Asymmetric impact of inflation and unemployment on poverty in Pakistan: new evidence from asymmetric ARDL cointegration*. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 28(4), 295-310.
- Suparman, Muzakir, Wahyuningsih, & Tallesang, M. (2021). Economic Growth, Income Inequality, and Poverty in Central Sulawesi. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(4), 14117–14125. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4080484>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson UK.
- Wina, A. (2019). Hubungan Negatif Antara Tingkat Inflasi Dengan Tingkat Kemiskinan Di Wilayah Perdesaan Provinsi Lampung. *Statistika*, 19(1), 63-69.
- Wudil, A.A., Saad, N.M., Omercic, J., Zakaria, L., & Muhammad, R. (2023). *Government Budgets and Poverty Reduction in Developing Countries: A Systematic Review of The Role Of Social Welfare Programs and The Challenges Ahead*. *Economics and Finance*.
- Zaki, Z. (2023). *Government Spending, Population, and Poverty*. *International Journal of Multidiscipliner Research and Analysis*. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i9-10>.